

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semua negara mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, maka upaya yang dilakukan pemerintah bukan hanya sebatas meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan tetapi juga mencapai pembangunan yang adil dan merata di segala bidang termasuk dalam bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, pemerintah berusaha mewujudkan melalui kontrol dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi termasuk kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha memperbesar pendapatan perkapita dan meningkatkan produktivitas dengan jalan menambah peralatan modal dan *skill*.<sup>1</sup> Pembangunan suatu negara tentunya memiliki sasaran yang harus tercapai. Menurut M.P Todaro terdapat beberapa sasaran dalam pembangunan ekonomi, yakni: (i) usaha meningkatkan pendapatan perkapita untuk mengangkat taraf hidup masyarakat, (ii) meningkatkan persediaan dan memperluas akses pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan dan (iii) memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua lapisan masyarakat.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi tersebut dibutuhkan modal. Akumulasi modal meliputi semua bentuk investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.<sup>3</sup>

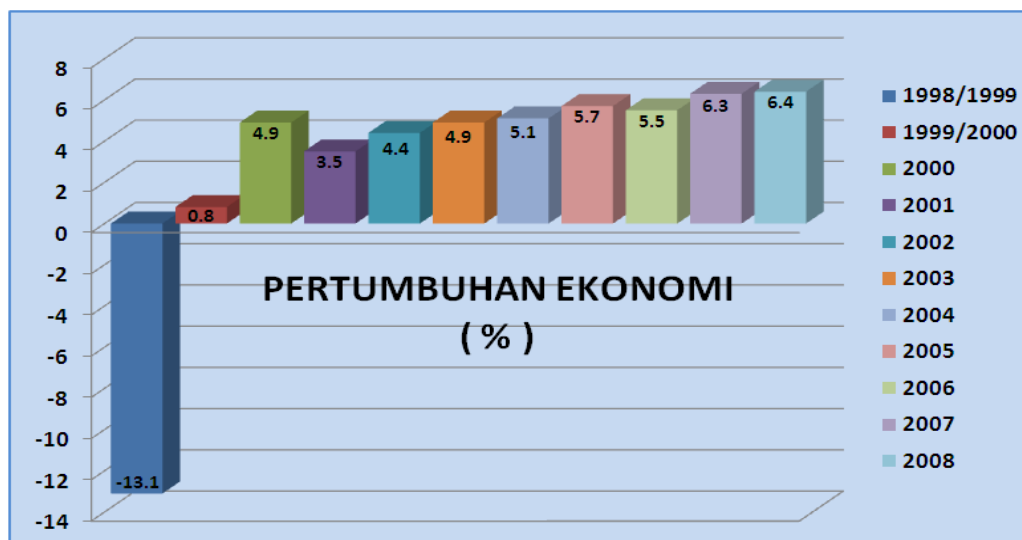
---

<sup>1</sup>Djojohadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991) p.82

<sup>2</sup>Alam, S. *Ekonomi Untuk SMA dan MA Kelas XI*. (Jakarta: Esis, 2007) p.64

<sup>3</sup>Todaro MP. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Erlangga, 2007) p.102

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki letak geografis strategis untuk menunjang kegiatan perekonomian negara. Dengan sumber daya manusia yang melimpah (SDM) menjadikan keunggulan dari Indonesia untuk perekonomian negara. Hal ini menjadi keunggulan komparatif tersendiri bagi Indonesia. Namun, hal tersebut tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) itu sendiri. Tidak hanya itu, rendahnya teknologi menjadikan sumber daya alam yang tersedia tidak mampu diolah secara maksimal. Di satu sisi, pemerintah terus berusaha melakukan peningkatan kualitas di bidang sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini dikarenakan selain uang, sumber daya manusia dan teknologi juga termasuk dalam sumber daya modal yang penting dalam menentukan cepat atau lambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi.



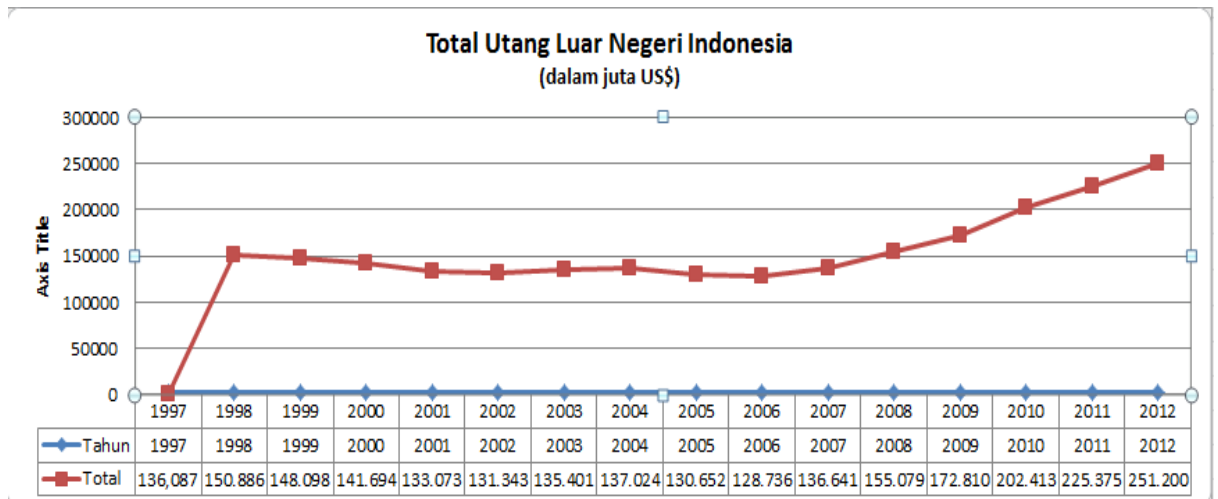
**Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1998-2008 (%)**  
*Sumber : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SEKI), Bank Indonesia*

Pada tahun 1990 hingga 1996, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi. Sedangkan pada tahun 1993, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6.5%. Tahun berikutnya sebesar 7.54% lalu terjadi peningkatan kembali pertumbuhan ekonomi yakni 8.22% tahun 1995. Namun pertumbuhan ekonomi yang

sedang meningkat saat itu terhantam ketika Thailand terkena krisis finansial pada tahun 1997. Dampaknya, mempengaruhi mata uang, bursa saham dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Hal itu membawa pengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menurun hingga sebesar -13.1%.

Krisis finansial yang terjadi di Thailand berawal dari berkurangnya kepercayaan investor terhadap perekonomian dan stabilitas politik negara Thailand. Sehingga investor memutuskan untuk menarik saham-saham mereka. Hal itu berdampak pada nilai tukar bath yang anjlok terhadap dollar sehingga terjadi krisis finansial. Krisis yang terjadi di Thailand itu berdampak pula terhadap negara-negara di kawasan Asia termasuk Indonesia. Dollar yang saat itu menguat membuat nilai tukar rupiah ikut terdepresiasi. Pada tahun 1997 nilai tukar rupiah melemah terhadap dollar dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650 per dollar. Mulai saat itu nilai tukar rupiah dalam kondisi tidak stabil. Sebenarnya pada awal tahun 1997 pertumbuhan ekonomi meningkat pesat, tetapi dengan biaya yang mahal dan fundamental ekonomi yang rapuh. Kondisi ini dapat dilihat pada buruknya sektor perbankan nasional. Hal ini ditandai dengan hilangnya kepercayaan masyarakat. Cadangan devisa yang mulai menipis yakni hanya sebesar US\$ 23,76 juta membuat Indonesia tidak dapat menghindari dari krisis moneter setelah terjadinya krisis mata uang.

Setelah krisis mata uang lalu disusul krisis moneter dan berakhir dengan krisis ekonomi yang begitu besar membuat perekonomian Indonesia mengalami *stagflasi*, laju inflasi yang tinggi, menurunnya tingkat produksi, tingginya tingkat ketergantungan terhadap barang dan jasa impor, pemutusan hubungan tenaga kerja, menurunnya tingkat pendapatan masyarakat yang membuat turunnya tingkat daya beli masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan posisi utang pemerintah dan swasta yang sudah sangat besar saat itu. Seperti yang digambarkan pada grafik dibawah ini:



**Gambar 1.2 Total Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1997-2012  
(Juta Dollar AS)**

*Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik*

Dari grafik diatas, terlihat bahwa salah satu beban ekonomi Indonesia adalah utang luar negeri yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 1997 total utang luar negeri Indonesia sebesar 136.087 juta dollar AS. Lalu, meningkat pada saat terjadi krisis ekonomi besar-besaran pada tahun 1998 hingga mencapai 150.886 juta dollar AS. Begitu juga pada tahun berikutnya 1999 naik menjadi 148.098 juta dollar AS. Namun mengalami penurunan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2000 menjadi 141.695 juta dollar AS. Utang luar negeri pun naik kembali pada tahun 2008 yaitu sebesar 155.079 juta dolar AS.

Peningkatan utang luar negeri yang diambil pemerintah bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dibutuhkan cadangan devisa yang sangat besar. Sedangkan pada saat itu, sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah cadangan devisa Indonesia hanya sebesar 23,74 juta dollar AS. Cadangan devisa tersebut sudah terkuras dengan tindakan masyarakat yang secara bersamaan membeli dollar dengan asumsi nilai mata uang dollar akan kembali naik. Sehingga pada saat itu pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri untuk menambah cadangan devisa.

Apabila dilihat dari gambar 1.2 sejak tahun 2002 posisi utang luar negeri Indonesia terus menerus mengalami penurunan yang disebabkan oleh stabilitas moneter yang semakin membaik dan kembalinya kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan nasional. Menurut laporan Bapennas hingga tahun 2002 kondisi perekonomian cenderung stabil dengan melihat tingkat inflasi yang mengalami penurunan hingga 5,1% menurun hampir dua kali lebih rendah dari dua tahun sebelumnya yakni sebesar 9,35%. dan defisit anggaran pun berkurang sebesar 2,1%. Membaiknya stabilitas moneter juga berpengaruh pada meningkatnya kepercayaan para investor di pasar modal. Dalam hal ini pemerintah pun memiliki andil dalam menurunkan total utang luar negeri Indonesia. Hingga pada tahun 2006, total utang luar negeri Indonesia berada di titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir yakni sebesar 128.736 juta dollar AS. Salah satu faktornya ialah karena pemerintah telah melunasi utang kepada IMF (*International Monetary Fund*). Alasan pelunasan tersebut karena pada saat itu Indonesia memiliki ketahanan ekonomi yang cukup kuat, cadangan devisa yang aman, dan kemampuan Bank Indonesia dalam membayar cicilan utang terhadap IMF (*International Monetary Fund*).

Akan tetapi, peningkatan utang terjadi kembali dimulai pada tahun 2007 yakni sebesar 136.641 juta dollar AS dan melonjak tajam pada kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2010, tercatat utang luar negeri Indonesia mencapai 202.413 juta dollar AS, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi 225.375 juta dollar AS. Lalu pada tahun 2012 utang luar negeri Indonesia melonjak menjadi 251.200 juta dollar AS. Rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun 2012 sudah mencapai 29%. Pemerintah telah mengurangi dan membatasi penarikan jumlah

utang luar negeri akan tetapi pada kenyatannya jumlah itu cenderung bertambah setiap tahunnya.<sup>4</sup>

Pada awal program pembangunan ekonomi, pemerintah berjanji bahwa utang luar negeri hanya berperan sebagai perangsang dan alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Akan tetapi, hingga saat ini tampaknya Indonesia belum mampu melepaskan ketergantungan terhadap utang luar negeri yang semakin kronis. Salah satu faktor membengkaknya utang luar negeri didukung oleh sektor swasta. Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution menyatakan bahwa utang luar negeri swasta mencapai 123.270 juta dollar AS per Oktober 2012, lebih tinggi dari utang pemerintah yaitu sebesar 120.640 juta dollar AS. Rasio utang luar negeri swasta meningkat dari sekitar 26,4 % pada 2011 menjadi sekitar 27,3 % terhadap produk domestik bruto pada 2012.

Secara alamiah, swasta akan lebih senang berutang ke luar negeri daripada ke dalam negeri karena beban bunga perbankan luar negeri lebih rendah ketimbang beban bunga perbankan Indonesia. Dengan banyaknya sektor swasta yang berutang ke luar negeri dalam bentuk dollar sementara hasil produknya dalam bentuk rupiah, maka akan ada risiko yang bisa meledak sewaktu-waktu. Ketika nilai tukar rupiah anjlok drastis terhadap dollar, utang swasta akan membludak dalam bentuk rupiah. Risiko krisis seperti pada tahun 1998 bisa terjadi kembali. Rupiah yang terdepresiasi akan membuat utang luar negeri semakin besar jumlahnya dalam bentuk rupiah walaupun nilai utang itu sendiri tetap sama dalam bentuk dolar. Kenaikan akumulasi utang luar negeri dalam bentuk rupiah menyebabkan pemerintah harus mengambil utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang sudah jatuh

---

<sup>4</sup>Wiranta, S. Krisis Anggaran Serta Dampaknya Terhadap Kenaikan Harga Minyak dan Utang Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP)*, XII (2). Pusat Penelitian Ekonomi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. 2004. p.3

tempo. Sedangkan di pihak swasta, peningkatan utang luar negeri terjadi akibat optimisme yang berlebihan akan prospek investasi dari beberapa perusahaan yang mendapatkan proteksi dari pemerintah.<sup>5</sup> Faisal Basri dalam bukunya “Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia” menyatakan bahwa proteksi yang diberikan pemerintah antara lain berupa bea masuk tinggi yang melahirkan distorsi. Akibat dari distorsi itu sendiri antara lain:

1. Terdapatnya praktik-praktik yang kurang sehat dalam memupuk keuntungan. Utang luar negeri swasta digunakan untuk mendirikan berbagai macam pabrik yang pengelolanya tidak dilakukan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Utang luar negeri sektor swasta kurang diikuti dengan pengelolaan utang yang berhati-hati. Kekurang hati-hatian itu terutama tercermin dari mencuatnya fenomena *maturity mismatch* dan *currency mismatch* yang dihadapi sektor perusahaan secara umum. *Maturity mismatch* terjadi karena utang jangka pendek yang diterima digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang, sehingga terdapat risiko akibat perbedaan jatuh tempo antara aset dan kewajiban yang dimiliki. Sedangkan *currency mismatch* merupakan keadaan dimana sektor swasta berutang dalam bentuk dollar akan tetapi outputnya menghasilkan rupiah. Sehingga, terdapat risiko dalam pengembalian utang apabila jumlahnya terlalu banyak.<sup>6</sup>

Disamping itu, pihak swasta yang didorong oleh pemerintah didukung untuk mengambil peranan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan berbagai deregulasi sejak tahun 1983. Masuknya Indonesia pada jajaran G-20 menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar yang dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB)

Dengan begitu, pemerintah berusaha untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju sehingga pada pertengahan tahun 2011 akhirnya pemerintahan mengesahkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia atau lebih dikenal dengan MP3EI. Dimana langkah awal dari program ini adalah meningkatkan pertumbuhan

---

<sup>5</sup>Basri, Faisal H. Perekonomian Indonesia: Tantangan dan harapan Kebangkitan Indonesia. (Jakarta: Erlangga, 2002) p. 256

<sup>6</sup> *Ibid.*, p.256

hingga 7% hingga 9% dan pembangunan akan dilaksanakan bukan hanya oleh pemerintah akan tetapi juga dengan *stakeholders* terkait.

Dengan adanya program MP3EI ini menjadikan pihak swasta sebagai elemen utama pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.<sup>7</sup> Dengan begitu peran swasta amat penting karena menopang pembangunan ekonomi. Namun, pemerintah kurang mengontrol darimana sumber investasi dan pembiayaan pembangunan yang dilakukan swasta termasuk utang luar negeri yang dilakukan oleh swasta. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan utang luar negeri swasta lebih besar dari utang luar negeri pemerintah. Bahkan sudah mencapai 27,3% dari produk domestik bruto, hal ini sungguh mengkhawatirkan. Karena mayoritas utang luar negeri yang dilakukan swasta bersifat jangka pendek akan tetapi dana tersebut dimanfaatkan untuk jangka panjang. Maka, untuk menutupi utang tersebut, swasta melakukan utang kembali pada luar negeri dan seterusnya. Tingginya utang luar negeri swasta bisa menjadi *silent killer* karena angkanya yang terus meningkat.

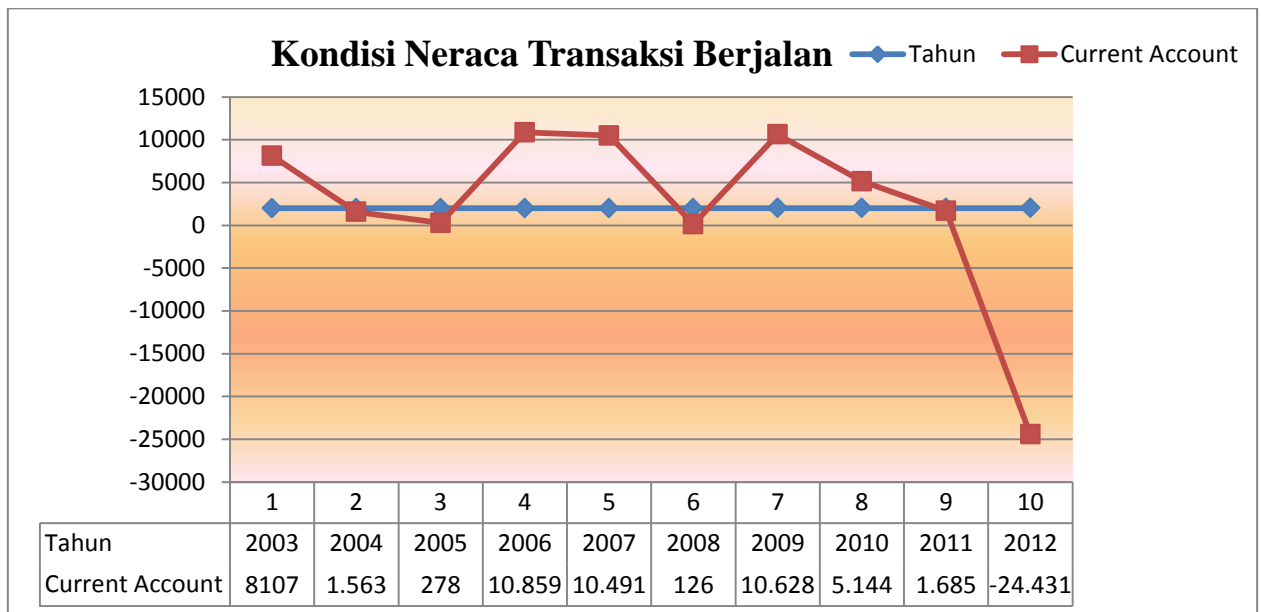
Selain itu, meningkatnya utang luar negeri ditimbulkan oleh kondisi neraca transaksi berjalan yang terus defisit. Defisit neraca transaksi berjalan disebabkan oleh kinerja perdagangan Indonesia yang tidak membaik dimana nilai ekspor lebih kecil dibandingkan nilai impor. Ekspor barang dan jasa yang seharusnya mampu menjadi salah satu cara untuk menambah cadangan devisa justru tidak dapat mengalami peningkatan. Bahkan kuantitas impor makin menaik tajam. Tercatat pada tahun 2012 total ekspor Indonesia menurun tajam yakni hanya sebesar 96.884,7 juta dollar AS. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 203.496,6 juta dollar AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan

---

<sup>7</sup><http://m.hatta-rajasa.info/read/1316/masterplan-pembangunan-ala-hatta>, diunduh tanggal 9 Mei



menurunnya harga komoditas migas merupakan penyebab semakin tingginya defisit transaksi berjalan. Hal ini dikarenakan komoditi utama seperti minyak sawit mentah, batubara dan karet mengalami penurunan harga. Disamping itu, defisit neraca transaksi berjalan yang meningkat disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan impor barang modal, bahan baku serta defisit sektor jasa yang cenderung meningkat. Masalah transportasi adalah bagian paling besar dalam menyumbang defisit pada sektor jasa. Berikut grafik mengenai kondisi neraca transaksi berjalan Indonesia dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 :



**Gambar 1.3 Kondisi Neraca Transaksi Berjalan (*Current Account*)  
Tahun 2003-2012 (Juta Dollar AS)**

*Sumber : Nota Keuangan, Badan Pusat Statistik*

Berdasarkan gambar 1.3, dalam sepuluh tahun terakhir kondisi neraca transaksi berjalan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2005 neraca transaksi berjalan hanya surplus sebesar 278 juta dollar AS atau sekitar 0,1% dari PDB. Hal itu disebabkan melonjaknya impor non migas dan kinerja transaksi berjalan migas. Kenaikan impor non migas dikarenakan sulitnya mengendalikan impor barang modal yang memang masih minim diproduksi oleh dalam negeri, selain itu sifat konsumtif masyarakat yang lebih menyukai barang impor menjadi salah satu penyebab masih tingginya

impor non migas. Disamping itu, defisit transaksi berjalan migas dimana terjadi kenaikan impor migas yang cukup signifikan dari 11.159 juta dollar AS pada tahun 2004 menjadi 16.031 juta dollar AS di tahun 2005. Sedangkan ekspor migas pada tahun 2005 hanya 9.524 juta dollar AS. Kinerja transaksi berjalan yang secara keseluruhan menurun tidak terlepas dari pengaruh melonjaknya harga minyak dunia. Selanjutnya pada tahun 2006 dan 2007, kondisi neraca transaksi berjalan membaik karena impor pada sektor non migas dapat ditekan oleh pemerintah.

Sedangkan, pada tahun 2008, defisit neraca transaksi berjalan kembali terjadi. Bahkan kali ini defisit transaksi berjalan meningkat drastis. Dibandingkan tahun sebelumnya, transaksi berjalan defisit sebesar 10.345 juta dollar AS pada tahun 2008. Alasannya, terjadi defisit transaksi berjalan pada sektor non migas dan defisit pada sektor jasa yang menyumbang sebesar 12.998 juta dollar AS padahal tahun sebelumnya hanya berkisar 3.000 juta dollar AS. Ditambah pada tahun 2008, Indonesia harus melakukan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo yakni sebesar 18.747 juta dollar AS. Sehingga, dampaknya pun pada tahun 2008 utang luar negeri Indonesia mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2012 merupakan kondisi terparah dari sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2012, neraca transaksi berjalan menyumbang defisit sebesar 24.431 juta dollar AS. Saat itu, semua sektor menyumbang defisit dalam porsi yang besar. Mulai dari impor sektor non migas yakni sebesar 179.878 juta dollar AS, lalu impor migas yang masih mengalami peningkatan sebesar 38.327 juta dollar AS, ditambah dengan sektor jasa yang menyumbang defisit. Serta, merosotnya nilai tukar rupiah hingga Rp 9.799 per dollar AS.

Peningkatan defisit neraca transaksi berjalan dapat menyebabkan digunakannya cadangan devisa untuk mendanai impor. Hal ini sangat membahayakan karena kestabilan ekonomi dapat terganggu dan selanjutnya menimbulkan laju

pembangunan ekonomi yang lambat. Penggunaan cadangan devisa untuk menutupi defisit neraca transaksi berjalan dapat dihindari apabila terdapat arus modal masuk (*capital inflows*). Se jauh ini di Indonesia, kekurangan pada neraca transaksi berjalan dapat ditutup dengan aliran modal masuk yang berasal dari luar negeri. Aliran modal ini pada dasarnya masuk melalui tiga pos yakni investasi asing (*foreign direct investment*), utang luar negeri (*offshore loan*), dan investasi portofolio (*portfolio investment*).

Dari ketiga alternatif tersebut, FDI merupakan yang paling layak dan aman. Karena jika upaya menutup defisit transaksi berjalan dilakukan dengan meningkatkan utang luar negeri, hasilnya akan memperburuk posisi akumulasi utang. Sedangkan masuknya investasi portofolio melalui pasar uang dan pasar modal, bersifat sangat labil. Dana tersebut merupakan uang panas (*hot money*) yang sewaktu-waktu dapat ditarik ke luar negeri. Akan tetapi, dikarenakan iklim investasi Indonesia yang kurang mendukung membuat para investor asing kurang tertarik menginvestasikan modalnya di Indonesia. Pada tahun 2011, penanaman modal asing hanya sebesar 19.474,5 juta dollar AS dan pada tahun 2012 sebesar 24.564,7 juta dollar AS. Sedangkan, untuk menutupi defisit neraca transaksi berjalan dibutuhkan dana sebesar kurang lebih 200 juta dollar AS.<sup>8</sup> Oleh karena itu, alternatif lain untuk menutupi defisit transaksi berjalan yakni menambah utang luar negeri agar tidak menguras cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga, pada tahun 2012 utang luar negeri Indonesia menjadi 252.364 juta dollar AS.

Namun, pemanfaatan utang luar negeri pada periode berikutnya justru menjadi beban yang menyebabkan defisit transaksi berjalan makin besar, karena kewajiban membayar angsuran ditambah bunga utang. Situasi dilematis ini mengakibatkan proses yang tidak berkesudahan dalam neraca pembayaran Indonesia. Defisit pada

---

<sup>8</sup>[www.kompas.com](http://www.kompas.com) edisi tanggal 19 Februari diunduh tanggal 20 Juni 2013

neraca jasa seperti yang dikatakan sebelumnya menjadi faktor yang membuat defisit neraca transaksi berjalan semakin besar. Semakin besar defisit pada neraca transaksi berjalan semakin besar pula utang luar negeri yang dibutuhkan untuk mengompensasikan defisit tersebut. Sehingga, utang luar negeri Indonesia pun semakin tinggi. Hal itu menyebabkan permintaan dolar meningkat di dalam negeri, yang mengakibatkan nilai rupiah menurun.

Menurunnya nilai mata uang rupiah menjadikan realisasi pembayaran utang luar negeri dalam rupiah dari anggaran APBN akan meningkat. Sedangkan kinerja pemerintah untuk menaikkan pendapatan dalam negerinya dapat dikatakan rendah. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari kondisi neraca perdagangan Indonesia pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1 Neraca Perdagangan Indonesia (Juta Dollar AS)**

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	TREND (%) 2007-2011	Januari - April		PERUB(%) 2012/2011
								2011	2012	
I	EKSPOR	114.100,9	137.020,4	116.510,0	157.779,1	203.496,6	13,86	61.941,7	64.498,1	4,13
	-MIGAS	22.088,6	29.126,3	19.018,3	28.039,6	41.477,0	13,00	11.917,7	13.346,2	11,99
	-NONMIGAS	92.012,3	107.894,2	97.491,7	129.739,5	162.019,6	14,06	50.024,0	51.151,9	2,25
II	IMPOR**)	74.473,4	129.197,3	96.829,2	135.663,3	177.435,6	19,54	53.683,0	62.369,2	16,18
	-MIGAS	21.932,8	30.552,9	18.980,7	27.412,7	40.701,5	11,94	12.347,4	14.506,1	17,48
	-NONMIGAS	52.540,6	98.644,4	77.848,5	108.250,6	136.734,0	22,21	41.335,6	47.863,1	15,79
III	TOTAL	188.574,3	266.217,7	213.339,3	293.442,4	380.932,2	16,23	115.624,7	126.867,3	9,72
	-MIGAS	44.021,4	59.679,2	37.999,0	55.452,3	82.178,6	12,47	24.265,1	27.852,3	14,78
	-NONMIGAS	144.552,9	206.538,6	175.340,2	237.990,1	298.753,6	17,28	91.359,6	99.015,0	8,38
IV	NERACA	39.627,5	7.823,1	19.680,8	22.115,8	26.061,1	2,03	8.258,7	2.128,8	-74,22
	-MIGAS	155,7	-1.426,6	37,5	626,9	775,5	0,00	-429,8	-1.159,9	169,90
	-NONMIGAS	39.471,7	9.249,7	19.643,2	21.488,9	25.285,5	-0,48	8.688,5	3.288,7	-62,15

**Sumber:** Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan

**Keterangan:**

\*) Angka sementara\*\*) Impor Termasuk Kawasan Berikat

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat mulai tahun 2007 hingga triwulan pertama tahun 2012 terjadi tren penurunan kinerja perdagangan Indonesia yang dirasakan mulai pada tahun 2011. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan kinerja perdagangan dunia sehingga berdampak pada laju ekspor nasional. Menurut data dari organisasi perdagangan dunia (WTO), laju pertumbuhan perdagangan dunia pada 2011 hanya mencapai 5,0% atau menurun tajam dibanding 2010 yang mencapai 13,8%. Sedangkan pada 2012, laju pertumbuhan menjadi 3,7% atau berada dibawah rata-rata pertumbuhan selama 20 tahun terakhir yang mencapai 5,4% pertahun. Jika penurunan kinerja ekspor tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, mengingat kontribusi ekspor terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto cukup signifikan yakni sekitar 25%. Selain itu, penurunan ekspor juga akan menimbulkan persoalan bagi perekonomian Indonesia, seperti berkurangnya cadangan devisa dan terjadinya gejolak nilai tukar rupiah.

**Tabel 1.2 Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran dalam APBN  
Tahun 2001-2012 (milyar rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pemerintah</b>	<b>Pengeluaran Pemerintah</b>	<b>Defisit / Surplus Anggaran</b>
<b>2001</b>	299.851	354.578	-54.727
<b>2002</b>	305.151	345.605	-40.454
<b>2003</b>	342.812	377,248	-34.436
<b>2004</b>	400,955	427,226	-26.271
<b>2005</b>	540.126	565.070	-24.944
<b>2006</b>	659.115	699.099	-39.984
<b>2007</b>	694.088	752.373	-58.285
<b>2008</b>	894.991	989.494	-94.503
<b>2009</b>	848,763	1.000.844	-152.081
<b>2010</b>	992.399	1.126.146	-133.747
<b>2011</b>	1.169.915	1.320.751	-150.836
<b>2012</b>	1.358.205	1.548.310	-190.105

*Sumber : Bank Indonesia (SEKI), 2013*

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dua belas tahun terakhir belanja negara lebih besar dari pendapatan negara yang berarti bahwa anggaran dalam kondisi defisit. Apabila dilihat dari tahun 2001 terdapat kenaikan pendapatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena adanya reformasi dalam kebijakan perpajakan yang dilakukan pemerintah dan berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Pada tahun 2005 penerimaan perpajakan dalam APBN menyumbang 351.974 milyar rupiah. Begitu juga pada tahun 2011 meningkat tajam menjadi 878.685 milyar rupiah dari total penerimaan.<sup>9</sup>

Akan tetapi hal tersebut belum dapat mencukupi belanja negara yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya dan menutupi anggaran yang defisit akibat akumulasi utang luar negeri dari periode sebelumnya. Adanya defisit anggaran yang cenderung meningkat membawa konsekuensi adanya peningkatan kebutuhan pembiayaan yang berpotensi menambah rasio utang. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa baik pemerintah dan swasta belum mampu melepaskan diri dari ketergantungan utang luar negeri dalam membiayai pembangunan nasional.

Kondisi ini membuat Indonesia terjebak dalam perangkap utang (*debt-trap*). Jika akumulasi utang luar negeri baik pemerintah dan swasta dibiarkan maka akan semakin terus meningkat. Hal itu akan memberikan implikasi yang kurang menguntungkan terhadap kestabilan moneter baik eksternal maupun internal, yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah yang memungkinkan terjadinya kembali gejolak ekonomi seperti krisis seperti tahun 1998. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta harus lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan utang luar negeri.

---

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Data Pokok Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)*. Jakarta. 2005 – 2011

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah yang dapat mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh nilai kurs rupiah terhadap utang luar negeri?
2. Apakah ada pengaruh nilai PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap utang luar negeri?
3. Apakah ada pengaruh utang luar negeri tahun sebelumnya terhadap utang luar negeri?
4. Apakah ada pengaruh neraca transaksi berjalan terhadap utang luar negeri?
5. Apakah ada pengaruh defisit anggaran terhadap utang luar negeri?

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, ternyata sangatlah kompleks, sehingga peneliti hanya membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah : “Pengaruh neraca transaksi berjalan dan defisit anggaran terhadap utang luar negeri di Indonesia.” Pembatasan ini dilakukan agar peneliti dapat lebih jelas dan terfokus mengkaji dan menganalisis fakta dan temuan yang diperoleh. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui data yang diperoleh pada tahun 1983 sampai tahun 2012.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh antara neraca transaksi berjalan dan defisit anggaran terhadap utang luar negeri selama tahun 1983 sampai tahun 2012?”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi dan memperluas pengetahuan serta wawasan berfikir tentang neraca transaksi berjalan dan defisit anggaran serta pengaruhnya terhadap utang luar negeri sehingga dapat menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam masalah neraca transaksi berjalan dan defisit anggaran terhadap utang luar negeri.